

**STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR
DALAM PENINGKATAN KINERJA INSPEKTORAT
UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Disusun Oleh:

NAMA : Ana Muta'affif
NPM : 1733000216
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM : MANAJEMEN SUMBER
STUDI : DAYA MANUSIA APARATUR



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
TAHUN 2022

**STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR
DALAM PENINGKATAN KINERJA INSPEKTORAT
UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Terapan
dalam Ilmu Administrasi Negara**

Disusun Oleh:

**NAMA : Ana Muta'affif
NPM : 1733000216
PROGRAM : MANAJEMEN SUMBER
STUDI : DAYA MANUSIA
APARATUR**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
TAHUN 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : Ana Muta'affif
NPM : 1733000216
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI
AUDITOR TERHADAP PENINGKATAN
KINERJA INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 3 Agustus 2022

Pembimbing



(Dr. Hamka, MA)

LEMBAR PENGESAHAN

**Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA-LAN Jakarta pada 19 September 2022**

Ketua merangkap anggota,



(Budi Fernando Tumanggor, SS., MBA)

Sekretaris merangkap anggota,

(Rima Ranintya Yusuf, SIP., MPA)

Anggota,

(Dr. Hamka, MA)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ana Muta'affif

NPM : 1733000216

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini dengan judul Strategi Peningkatan Kompetensi Auditor dalam Peningkatan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 10 Agustus 2022

Penulis,



Ana Muta'affif
NPM 1733000216

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji hanya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi yang berjudul “Strategi Peningkatan Kompetensi Auditor dalam Peningkatan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI” ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Diploma IV (Empat) Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sebagai manusia mahluk ciptaan-Nya tidak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dan data yang dimiliki, penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini sehingga bermanfaat bagi Organisasi Unit kerja, rekan-rekan mahasiswa dan penulis secara pribadi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Hamka, M.A. selaku dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini, dan juga pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua yang saya hormati, ayahanda Lamparsita dan Ibunda tercinta Sriyati yang selama ini telah melahirkan, merawat, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas semua pengorbanan, perhatian, serta segala dukungan moril dan moral dan juga doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Istri tersayang yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang serta yang selalu memberikan semangat lahir maupun batin;
3. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A selaku Direktur Politeknik STIA-LAN Jakarta;

4. Dosen-dosen Politeknik STIA-LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis belajar di STIA LAN Jakarta;
5. Bapak Budi Fernando Tumanggor, SS., MBA. selaku Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Para Bapak/Ibu Pejabat serta rekan-rekan kerja di lingkungan Inspektorat Utama Setjen DPR RI yang selalu memberikan bantuan saran dan ide-ide yang membangun penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekjen DPR RI yang telah memberikan kesempatan saya untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
8. Rekan-rekan mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Karunia-Nya dan membalas segala amal budi dan kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri dan juga kepada semua pihak yang membacanya.

Jakarta, Agustus 2022

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Ana Muta'affif
NPM. 1733000216

Abstrak

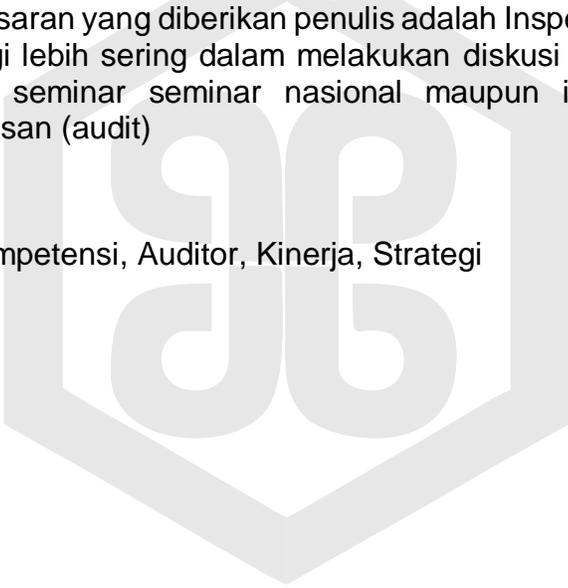
Ana Muta'affif, 1733000216
Strategi Peningkatan Kompetensi Auditor dalam Peningkatan
Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Skripsi, X, 107 hal

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan penyelewengan dan kebocoran yang akan merugikan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam pencapaian tujuan organisasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran yang akan merugikan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pada Sekretariat Jenderal DPR RI Pengawasan Intern dilakukan oleh Inspektorat Utama unit organisasi eselon I sesuai dengan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 6 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 7 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Pene menggambarkan saat ini terdapat permasalahan dalam Aspek kompetensi Auditor dan Aspek Kinerja Auditor dalam Inspektorat Utama. Permasalahan dalam Aspek Kompetensi Auditor antara lain: *pertama*, Auditor internal yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas audit kurang memiliki kompetensi dalam mengelola audit internal; *kedua*, Auditor internal tidak memiliki power sehingga auditee kerap kali tidak menindaklanjuti temuan audit; *ketiga*, Kegiatan audit internal dinilai mengganggu pekerjaan auditi; *keempat*, Audit dilakukan untuk mencari kesalahan orang/auditi. Dari sisi Aspek Kinerja Auditor terdapat permasalahan kinerja Auditor yang belum tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya.

Bahwa dari permasalahan tersebut di atas telah ada berbagai upaya telah dilakukan oleh Inspektorat Utama untuk meningkatkan kompetensi Auditor yang dijabarkan melalui aspek variabel kinerja dan aspek variabel Kompetensi sebagai tolak ukur meningkatkan Kinerja Inspektorat Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Aspek variabel kinerja terdiri dari aspek Kualitas, aspek Kuantitas, aspek Waktu, dan aspek Kerjasama. Adapun aspek variable kompetensi terdiri dari aspek *knowledge*, aspek *skill* serta aspek *attitude*. Kemudian terkait strategi Inspektorat Utama dalam upaya peningkatan kinerja telah menyusun Renstra dengan mempertimbangkan hasil dari LAKIP dan AKIP tahun sebelumnya sehingga tersusun strategi yang dapat meningkatkan kinerja dari Auditor di lingkungan Inspektorat Utama.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran berdasarkan tiga variabel penelitian. Pertama variabel kinerja, saran yang diberikan adalah dilakukan peningkatan supervisi oleh pimpinan terhadap hasil laporan kegiatan auditor, kedua variabel kompetensi, yaitu Inspektorat Utama bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekjen DPR dalam memberikan peluang kepada Auditor untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, dan ketiga variabel strategi, saran yang diberikan penulis adalah Inspektur Utama sebagai pimpinan tertinggi lebih sering dalam melakukan diskusi penyelesaian kasus dan menghadiri seminar nasional maupun internasional terkait dengan pengawasan (audit)

Kata Kunci : Kompetensi, Auditor, Kinerja, Strategi



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Abstract

Ana Muta'affif, 1733000216

The Impact of Auditor Competence on the Performance
of the Main Inspectorate Within the Secretariat General of the
DPR RI

Thesis, X, 107 pages

The supervisory function carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is very important in achieving organizational goals to avoid fraud and leakage that will harm the government in carrying out its main duties and functions. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) plays a role in achieving organizational goals to avoid irregularities, fraud and leakages that will harm the government in carrying out its main tasks and functions. At the Secretariat General of the DPR RI, Internal Control is carried out by the Main Inspectorate under of echelon I organizationed units in accordance with the regulation of the Secretary General of the DPR RI number 6 of 2021 concerning the second amendment to the regulation of the Secretary General of the House of Representatives Number 7 of 2018 concerning the Organization and working procedures of the Secretary General and the Expertise Board DPR RI. The author describes that currently there are problems in the competence aspect of the audite and the audite's performance aspect in the main inspectorate. Problems in the Auditor Competency Aspect included: first, the internal auditor appointed to carry out audit duties lacks competence in managing internal audit; second, the internal auditor does not have the power so that the auditee often does not follow up on audit findings; third, Internal audit activities are considered to interfere with the work of the auditee; fourth, the audit is conducted to find fault with the person/auditee. In terms of the Auditor Performance Aspect, there are problems with the performance of the Auditors who are not on time in completing their duties. Whereas from the problems mentioned above, various efforts have been made by the Main Inspectorate to improve the competence of the Auditor which is described through aspects of performance variables and aspects of competence variables as a benchmark for improving the performance of the Main Inspectorate within the Secretariat General of the DPR RI. Aspects of performance variables consist of aspects of quality, aspects of quantity, aspects of time, and aspects of cooperation. The aspect of the competency

variable consists of aspects of knowledge, aspects of skills and aspects of attitude.

Then related to the Main Inspectorate's strategy in an effort to improve performance, a Strategic Plan has been drawn up by considering the results of the previous year's LAKIP and AKIP so that a strategy is formulated that can improve the performance of the Auditors within the Main Inspectorate.

From the results of this study, the authors provide suggestions based on three research variables. The first is the performance variable, the advice given is to increase supervision by the leadership on the results of the auditor's activity report, the two competence variables, namely the Main Inspectorate in collaboration with the Education and Training Center of the Secretary General of the DPR in providing opportunities for the Auditor to improve competence and knowledge, and the three strategy variables, The advice given by the author is that the Main Inspector as the highest leader is more often in discussing case resolution and attending national and international seminars related to supervision (audit)

Keywords : *Competency, Auditor, Performance, Strategic*

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
LEMBAR PERNYATAAN	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	VII
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR SINGKATAN	XIII
DAFTAR ISTILAH	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
DAFTAR ISI	XVII
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A Latar Belakang Permasalahan	1
B Rumusan Permasalahan	15
C Tujuan Penelitian	16
D Manfaat Penelitian	16
BAB II KERANGKA TEORI	
A Tinjauan Teori	
1. Kinerja	18
a. Pengertian Kinerja	18
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja	20
c. Pengertian dan Tujuan Manajemen Kinerja	22

	d. Prinsip Dasar Manajemen Kinerja	24
	3. Strategi	
	a. Pengertian Strategi	26
	b. Proses Perencanaan Strategi	28
	2. Kompetensi	
	a. Pengertian Kompetensi Auditor	30
	b. Jenis Kompetensi	34
	c. Kategori Kompetensi	34
	d. Hubungan Kompetensi dengan Kinerja	35
B	Konsep Kunci	37
C	Kerangka Berfikir	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
A	Metode Penelitian	41
B	Teknik Pengumpulan Data	43
	1. Wawancara	44
	2. Observasi	47
	3. Telaah Dokumen	49
C	Prosedur Pengelolaan dan Analisis Data	
	1. Pengelolaan Data	50
	2. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN		
A	Deskripsi Obyek Penelitian	56
	1. Gambaran Umum Inspektorat Utama	56
	2. Sasaran-sasaran Inpektorat Utama	59
	3. Nilai Organisasi Inspektorat Utama	59
B	Analisis Data Penelitian	

1. Aspek Kinerja	62
1.1 .Sub Aspek <i>Kualitas</i> Audit	63
1.2. Sub Aspek <i>Kuantitas</i>	69
1.3. Sub Aspek Waktu	73
1.4. Sub Aspek Kerjasama	77
2. Aspek Kompetensi	79
2.1. Sub Aspek <i>Knowledge</i>	80
2.2. Sub Aspek <i>Skill</i>	85
2.3.Sub Aspek <i>Attitude</i>	88
3. Aspek Strategi	94
3.1. Sub Aspek <i>Vision Statement</i>	95
3.2. Sub Aspek <i>Mission Statement</i>	96
3.3. Sub Aspek Target Tahunan	98
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
A	Kesimpulan 103
1.	Aspek Kinerja 103
2.	Aspek Kompetensi 104
3.	Aspek Strategi 105
B	Saran 106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Keterangan	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	40
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	61
Gambar 4.2	Jumlah surat Tugas auditor 2021	71
Gambar 4.3	Jumlah surat Tugas auditor 2022	72
Gambar 4.4	Evaluasi Laporan Hari Kalender 15 Hari Setelah Penugasan	75
Gambar 4.5	Benchmarking/Knowledge ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur	83
Gambar 4.6	knowledge sharing Inspektorat Provinsi Aceh	84
Gambar 4.7	kegiatan Pemantauan/Observasi	86
Gambar 4.8	kegiatan Pendampingan	87
Gambar 4.9	Auditor Sebagai Agen Perubahan	92
Gambar 4.10	Isi Surat Penugasan Auditor	93
Gambar 4.11	Auditor Sebagai role model	93
Gambar 4.12	Menyelenggarakan Program Pelatihan Mandiri (PPM)	100
Gambar 4.13	Focus Group Discussion (FGD)	101

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 1.1	Tabel Perbandingan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019-2021	4
Tabel 1.2	Tabel Kompetensi dan Capaian Kinerja Inspektorat Utama	7
Tabel 1.3	Tabel Jumlah Presentase TLHP APIP tahun 2021	9
Tabel 1.4	Tabel rekapitulasi surat tugas dan laporan Inspektorat Utama tahun 2021	9
Tabel 1.5	Tingkat level APIP IACM	11
Tabel 1.6	Diklat Auditor Inspektorat Utama Setjen DPR RI Tahun 2021	13
Tabel 1.7	Jumlah auditor di Inspektorat Utama Setjen DPR RI tahun 2021	14
Tabel 3.1	Key-Informan	47
Tabel 4.1	Misi Inspektorat Setjen DPR RI	58
Tabel 4.2	Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama	60
Tabel 4.3	Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021	66
Tabel 4.4	Tabel Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	76
Tabel 4.5	Nilai Telaah Sejawat Yang dilakukan Kementerian Perdagangan	79
Tabel 4.5	Sebaran Pendidikan Formal/Informal auditor Inspektorat Utama	82

DAFTAR ISTILAH ASING

assurance activities

anti corruption activities

consulting activities

Audit Capability Model

good governance

performance

Knowledge

skill

attitude

Core competencies

Managerial competencies

Functional competencies

Task achievement

Relationship

Personal attribute

Managerial

Leadership

generalship

Strategic plan

Mission statemen

Core values

Vision statement

Action Plans

ability

Stakeholder

DAFTAR SINGKATAN

APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
OTT	Operasi Tangkap Tangan
SETJEN	Sekretariat Jenderal
SEKJEN	Sekretaris Jenderal
ITTAMA	Inspektorat Utama
IRTAMA	Inspektur Utama
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
K/L	Kementerian/Lembaga
IACM	Internal Audit Capability Model (IACM)
BPKP	Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan
SDM	Sumberdaya Manusia
STAN	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
PNS	Pegawai Negeri Sipil
SWOT	<i>Strengths weaknesses opportunities threats</i>
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPNASN	Pegawai Pemerintah Non Aparat Sipil Negara
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat
LHKASN	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
SAKIP	Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAK	Laporan Akuntabilitas Kinerja



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Keterangan
Lampiran 1	Matriks Pengembangan Instrumen
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Pedoman Observasi
Lampiran 4	Pedoman Telaah Dokumen
Lampiran 5	Transkrip Wawancara
Lampiran 6	Telaah Dokumen
Lampiran 7	Foto Observasi
Lampiran 8	Sertifikat
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada dasarnya setiap organisasi mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan apa yang ingin dicapai yang sering kita kenal dengan visi dan misi organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan pengelolaan fungsi manajemen yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran yang akan merugikan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan audit merupakan salah satu instrumen pengawasan keuangan negara di sektor pengawasan. Kinerja auditor yang handal merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan audit tersebut. Kompetensi auditor yang memadai dan pemahamannya terhadap Sistem Informasi Akuntansi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pelaksanaan audit.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial

melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan peningkatan peranan instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan hal ini diperlukan peran APIP yang efektif. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang kompeten dengan hasil audit internal yang semakin berkualitas sebagai capaian kinerja organisasi.

APIP berperan dengan efektif sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu :

1. Memberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*);
3. Memberi masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*consulting activities*).

Salah satu bukti pengawasan APIP yang dianggap kurang efektif dan efisien, dapat ditemukan dengan masih adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat pemerintah pusat maupun pejabat pemerintah daerah. Sebagai contoh OTT Bupati Langkat Sumatera Utara Terbit Rencana Perangin-Angin pada tanggal 18 Januari 2022 diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, awal tahun 2022 KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri). Dengan adanya kejadian kasus tersebut memberikan dampak negatif yang besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh profesi auditor karena dianggap sebagai pihak ketiga yang dapat memberikan jaminan atas relevansi dan keadaan sebuah laporan keuangan.

Di Sekretariat Jenderal DPR RI pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat Utama. Inspektorat Utama Setjen DPR RI terbentuk 17 September 2015, yang sebelumnya hanya setingkat Bagian atau Eselon III yang disebut dengan Bagian Pengawasan menjadi Unit Organisasi Eselon I Inspektorat Utama. Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Berdasarkan pasal 251 ayat 1 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan mandatnya, Inspektorat Utama setjen DPR RI telah menetapkan visi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 yaitu : “Mendukung terwujudnya Inspektorat Utama yang professional dan kompeten”. Dalam menunjang tugas pengawasan tersebut dituntut para Auditor di lingkungan Inspektorat utama yang memiliki kompetensi yang handal dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dapat menyampaikan laporan dengan tepat waktu.

Berdasarkan perbandingan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Setjen DPR RI tahun 2019 – 2021, kinerja Auditor di lingkungan Utama sebagaimana terlihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Tabel Perbandingan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019 - 2021

No	Indikator Kinerja	2019	Indikator Kinerja	2020	2021
1	Nilai Internal 8 (delapan) Area Perubahan	BB	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (75, 81)	BB (76,63)
2	Level <i>Internal Audit Capability Models</i> (IACM)	Level 3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (64,60)	B (64,90)
3	Persentase Tindaklanjut Atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	56 %	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	2 (Pusdiklat & Biro KSAP)	4

4	Jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, terdiri atas: a. Dokumen Perencanaan dan Keuangan b. Dokumen Kepegawaian dan Umum c. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	3 Dokumen	Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3 (3,858)
5			Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3 (Dengan Catatan)	Level 3 (3,00)
6			Presentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK.	73%	77%
7			Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB (75, 81)	BB (76,63)
8			Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Utama	B (64,60)	B (64,90)

Sumber : Renstra dan LAK Inspektorat Utama Sekjen DPR RI tahun 2019 - 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 indikator kinerja tahun 2019 Inspektorat Utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019

ditandatangani Inspektur Utama sebagai pihak pertama dan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai pihak kedua, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. 4 (empat) Indikator Kinerja (IK) diantaranya Nilai Internal 8 (delapan) Area Perubahan yaitu BB, Level Internal *Audit Capability Models* (IACM) adalah level 3, Persentase Tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal sebesar 56%, dan Jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, terdiri atas Dokumen Perencanaan dan Keuangan, Dokumen Kepegawaian dan Umum dan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan terdapat 3 dokumen.

Sedangkan di tahun 2020 dan tahun 2021 Inspektorat Utama menetapkan indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK) yang targetnya sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi dengan realisasi tahun 2020 BB (75, 81) tahun 2021 BB (76,73), Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 B (64,60) tahun 2021 B (64,90), Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM tahun 2020 adalah 2 (dua) unit kerja, tahun 2021 4 (empat) unit kerja, Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2020 level 3, tahun 2021 level 3 dengan nilai (3,858), Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP tahun 2020 level 3 dengan catatan tahun 2021 level 3 (3,00), Presentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK tahun 2020 73%, tahun 2021 77%, Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama tahun 2020 BB (75,81),

tahun 2021 BB (73,63), Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2020 B (64,60), tahun 2021 B (64,90).

Tabel 1.2
Tabel Kompetensi dan Capaian Kinerja Inspektorat Utama

Tahun	Kompetensi		Kinerja		
	Diklat Penjenjangan	Diklat Teknis	Surat Tugas	Laporan	Presentase
2020	13 auditor	20 auditor	285	205	71,92%
2021	21 auditor	31 auditor	263	209	79,46%

Sumber : Aplikasi Pusdiklatwa BPKP dan Laporan Kegiatan Inspektorat Utama Tahun 2020-2021

Dari Tabel perbandingan di atas, diperoleh informasi bahwa peningkatan/penurunan kinerja Auditor di Irtama, setidaknya dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh auditor. Hal ini diperoleh dengan melihat bahwa dengan mengikuti diklat baik penjenjangan dan teknis, mempengaruhi tingkat penyelesaian laporan yang telah dilakukan. Semakin banyak mengikuti diklat, semakin tinggi tingkat penyelesaian laporan, yang meningkatkan prosentase kinerja Inspektorat Utama.

Dengan merujuk dari data dan informasi tersebut, maka peneliti dapat merumuskan latar belakang penelitian “Strategi peningkatan Kompetensi auditor terhadap peningkatan kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI” adalah sebagai berikut :

1. Strategi Inspektorat Utama dalam hal peningkatan kinerja Inspektorat tertuang di dalam Renstra Irtama tahun 2015 – 2019 dan Renstra tahun 2020 – 2024. Dalam hal ini strategi tahun 2019 adalah :
 - peningkatan Laporan hasil Audit (Level *Internal Audit Capability Models* (IACM) = Level 3, dan
 - Laporan Hasil Pengawasan Internal = 56%, sedangkanStrategi tahun 2020 – 2021 adalah :
 - peningkatan hasil penilaian APIP = Level 3 dengan catatan, dan
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja = B (64,60%)
2. Nilai Kinerja Auditor dari tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagaimana terlihat dari laporan kinerja pegawai di lingkungan Irtama, sebagaimana di bawah ini

Berdasarkan hasil laporan kinerja Inspektorat Utama :

Tahun 2020 Indikator Kinerja TLHP APIP tidak masuk dalam perjanjian kinerja tahunan Inspektorat Utama. Tahun 2021 TLHP APIP terdapat 47,73% rekomendasi yang belum sesuai, 6,82% belum ditindaklanjuti, dan 5,68% tidak dapat ditindaklanjuti. Sehingga hanya 70% dari Perjanjian Kinerja yang dibuat pada tahun 2021.

Sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Tabel Jumlah Presentase TLHP APIP Tahun 2021

	Berdasarkan Jumlah Rekomendasi				Berdasarkan Nilai Rekomendasi	
	% Selesai	% Belum Sesuai	%Belum Ditindaklanjuti	% Tidak dapat ditindaklanjuti	% Selesai	% Belum Sesuai
INSPEKTORAT I	15,38	76,92	7,69	0,00	93,78	6,22
	20,00	80,00	0,00	0,00	26,78	73,22
	23,81	52,38	23,81	0,00	50,29	49,71
	20,51	64,10	15,38	0,00	65,58	34,42
	100,00	0,00	0,00	0,00	100	0
INSPEKTORAT II	51,72	37,93	0,00	10,34	0	100
	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	12,50	75,00	0,00	12,50	0	0
	57,14	34,69	0,00	8,16	46,34	53,66
	40,91	47,73	6,82	5,68	62,35	37,65

Sumber : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

Tabel 1.4

Tabel rekapitulasi surat tugas dan laporan Inspektorat Utama tahun 2021

JANUARI S.D. DESEMBER 2021	ST USULAN AWAL	ST BATAL	LAINNYA	ST TANPA LAPORAN/ NON WAS	SURAT TUGAS (BERLAKU)	ST/KEGIATAN DENGAN LAPORAN	ADA LAPORAN	BELUM ADA LAPORAN	KATEGORI PENYAMPAIAN LAPORAN						JUMLAH REKOMENDASI/SARAN
									SB	B	C	TB	STB L	STB BL	
Jumlah s.d. TW IV (Berdasarkan Data Siratu s.d. 04012022)	283	9	1	11	274	263	209	54	46	58	42	28	36	54	15
							79,46768	20,5323	100						
							Persentase Laporan Kegiatan dari Januari s.d. Desember 2021 (6 Des 2021) =	79,47%	20,53%						

Sumber : matrik kegiatan Inspektorat Utama tahun 2021, Subbagian evaluasi dan laporan Inspektorat Utama Setjen DPR RI. Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.4 mengenai rekapitulasi surat tugas dan laporan kegiatan Inspektorat Utama tahun 2021, diperoleh data bahwa terdapat sejumlah 283 penugasan yang diterbitkan. Dari jumlah penugasan tersebut terdapat 9 surat tugas dibatalkan (kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena bersamaan dengan kegiatan lain), 1 surat tugas lainnya (diterbitkan unit kerja lain), 11 surat tugas yang tidak memerlukan laporan (misalnya

kegiatan penyerahan data/eviden ke K/L atau perpindahan penugasan pegawai antar-Inspektorat), sehingga surat tugas yang diterbitkan pada tahun 2021 sejumlah 274 dan penugasan yang memerlukan laporan sejumlah 263 penugasan.

Selain itu Tabel 1.4. juga menginformasikan bahwa dari 283 surat tugas yang diterbitkan, sampai dengan akhir Desember 2021, diketahui terdapat 209 laporan penugasan atau 79,47% dan yang belum menyampaikan laporan kegiatan sejumlah 54 penugasan atau 20,53%.

3. Kompetensi Auditor

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa :

- Tahun 2020 dengan 12 diklat yang diikuti oleh 33 auditor menghasilkan kinerja 71,92%;
- Tahun 2021 dengan 16 diklat yang diikuti oleh 52 auditor menghasilkan kinerja 70,46%.

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektifitas peran unit audit internal di sektor publik adalah model penilaian yang disebut

Internal Audit Capability Model (IACM) atau model kapabilitas audit internal sesuai dengan Peraturan BPKP, PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Inspektorat Utama Setjen DPR RI mendapatkan nilai IACM tahun 2019 dengan level 3^{DC} (dengan Catatan) dapat dihilangkan yaitu dengan system atau model penilaian risiko dan manajemen risiko.

Tabel 1.5
Tingkat level APIP IACM



Sumber : PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Capaian level 3 (*integrated*) bertujuan agar APIP dapat melaksanakan perannya dalam menilai dan melaporkan tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan, serta memberikan saran kepada manajemen, yang mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian. Salah satu elemen dari level 3 yaitu pengelolaan SDM dengan membangun tim dan kompetensi sumber daya manusia.

Kemampuan sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat secara profesional dan akuntabel merupakan faktor utama dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Kualitas sumber daya aparatur tersebut tentu perlu didukung oleh sistem manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi.

Merujuk kepada penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, yang meneliti mengenai kompetensi, kinerja dan strategi, diperoleh data bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rosmaini dan Tanjung (2019) kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Sulistiyowati (2018). Penelitian yang dilakukan oleh Noviana, Martono, dan Murtiningsih (2016) strategi berperan terhadap peningkatan kompetensi, dan strategi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja. Menjadi hal yang menarik apakah kondisi yang sama terjadi pada auditor Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam melaksanakan pengawasan internal, kemampuan kompetensi Auditor yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama. Kondisi Institusi saat ini dilihat dari indikator jumlah SDM relatif masih kurang, pada Februari 2021, Inspektorat Utama mendapat tambahan pegawai sejumlah lima belas pegawai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) melalui pengangkatan CPNS

Tahun Anggaran 2020, untuk menduduki jabatan fungsional auditor, yang ditempatkan pada Inspektorat I sejumlah tujuh orang, dan pada Inspektorat II ditempatkan sejumlah delapan orang.

Dalam rangka menunjang kinerja Inspektorat Utama melakukan pembinaan auditor dengan diklat penjenjangan dan diklat teknis instansi. Adapun beberapa diklat auditor yang sudah mengikuti diklat seperti Tabel di bawah ini :

Tabel 1.6

Diklat Auditor Inspektorat Utama Setjen DPR RI Tahun 2021

Diklat Penjenjangan	Diklat Penjenjangan
1. Penjenjangan Auditor Utama;	1. Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik;
2. Penjenjangan Auditor Muda;	2. Penilaian Maturitas SPIP;
3. Pembentukan Auditor Pertama;	3. Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
4. Pembentukan Auditor Terampil;	4. Analisa Pemecahan Masalah;
	5. Penilaian Angka Kredit JFA;
	6. Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengelolaan Hasil Pengawasan ;
	7. Penulisan Laporan Hasil Audit Intern;
	8. <i>Probitas</i> Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
	9. Audit Kinerja Kementerian/Lembaga;
	10. Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Masa Pandemi Covid-19;
	11. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
	12. Audit Investigasi;
	13. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik di Lingkungan APIP (Pembelajaran Jarak Jauh);
	14. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik;
	15. Audit Ketaatan;
	16. Diklat <i>Analytics</i> untuk Audit;
	17. Penyusunan Kertas Kerja Audit Intern;
	18. Teknik Audit Berbantuan Komputer;

	19.Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
--	--

Sumber : surat pengajuan diklat penjenjangan dan diklat teknis auditor Inspektorat Utama Setjen DPR RI ke kepala pusat pendidikan dan pelatihan BPKP RI tahun 2021.

Banyaknya auditor yang belum mengikuti diklat penjenjangan auditor dan diklat teknis/subtansi ini juga menjadi masalah atau kendala pada saat ini yang harus diselesaikan supaya bisa berpengaruh terhadap kinerja auditor yang diharapkan. sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*). Pemecahan permasalahan tersebut diantaranya dengan diadakan Bimtek, Workshop, PPM dan *knowledge sharing* di Inspektortat Utama. Dan kendala-kendala yang lain yang mempengaruhi kinerja selama ini adalah masih banyaknya pekerjaan mandatori (tugas audit dari Inspektur) sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam penugasan pengawasan antara surat tugas yang satu dengan surat tugas yang lain.

Pada saat ini auditor di Inspektorat Utama Setjen DPR RI yang terbagi di Inspektorat I dan Inspektorat II yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 7

Jumlah auditor di Inspektorat Utama Setjen DPR RI tahun 2021

Unit	Auditor Utama	Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Pertama	Auditor Terampil	Jumlah
Inspektorat I	-	1	4	4	10	19
Inspektorat II	-	1	3	4	10	18
TOTAL						37 Auditor

Sumber : Data Subbagian Tata Usaha Inspektorat Utama Tahun 2021

Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat begitu banyak aparat pemeriksa dan pengawas (auditor) yang dimiliki pemerintah, tetapi ternyata belum mampu mencapai kinerja yang maksimal. Lembaga pengawas ini belum mampu melaksanakan fungsi dengan baik padahal di sisi lain pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan keuangan adalah tugas pokok dan fungsi dari lembaga ini. Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kapanpun bila dianggap perlu.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut fenomena kinerja APIP pada Inspektorat Utama Setjen DPR RI dengan judul “Strategi peningkatan kompetensi auditor dalam peningkatan kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti merumuskan rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut : “Bagaimana strategi peningkatan kompetensi auditor dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI” ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dengan judul “Strategi Peningkatan Kompetensi Auditor dalam Peningkatan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI” adalah :

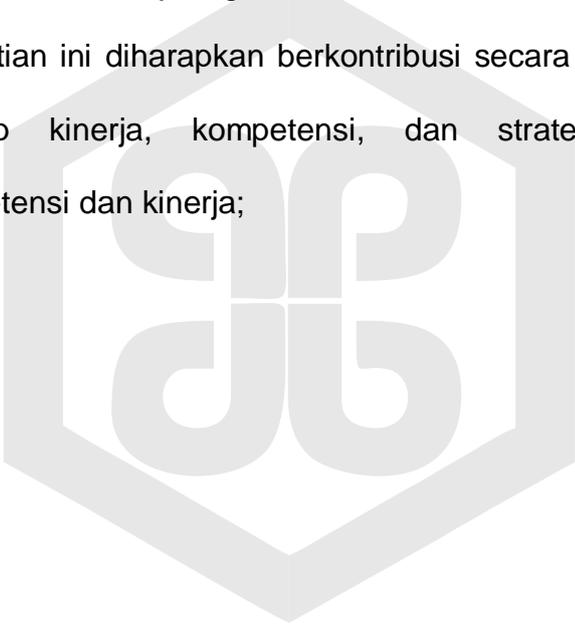
- a) Untuk mengetahui kinerja Inspektorat Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b) Untuk mengetahui faktor penentu kompetensi auditor
- c) Untuk menentukan strategi pengembangan kompetensi auditor dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan judul penelitian “Strategi Peningkatan Kompetensi Auditor dalam Peningkatan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI” adalah :

- a. Manfaat Penelitian terhadap dunia akademi
 1. Menambah wawasan kepada pihak terkait pentingnya kompetensi dalam peningkatan kinerja organisasi.
- b. Manfaat Penelitian terhadap dunia praktis
 1. Implementasi praktis dari penelitian ini adalah menyusun desain dan model pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kinerja organisasi;

2. Menyediakan informasi kepada pengambil keputusan dan pihak terkait lainnya untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja organisasi.
3. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoritis terhadap konsep kinerja, kompetensi, dan strategi peningkatan kompetensi dan kinerja;



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**